

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) lahir dari upaya Presiden B.J.Habibie kala itu untuk pemerataan pembangunan daerah-daerah tertinggal di KTI (Kawasan Timur Indonesia) yang jauh tertinggal dari KBI (Kawasan Barat Indonesia) dimana KAPET merupakan model pembangunan yang dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi yang terencana termasuk pengembangan infrastruktur pendukung dan manajemen lainnya. Oleh karenanya, KAPET lebih menganut kepada pembangunan yang terencana, yang dalam ekonomi regionalnya mengadopsi pembangunan pusat pertumbuhan *growth poles*. Dalam prosesnya pembangunan kawasan KAPET dibiayai secara nasional melalui APBD dan APBN, sehingga adanya kepastian pendanaan proyek karena tercantum dalam rencana nasional dan ini merupakan sebuah keberuntungan bagi daerah yang dijadikan prioritas (Keppres No. 150 Tahun 2000 tentang KAPET).

Salah satu contoh keberhasilan model pembangunan seperti KAPET diluar negeri adalah China, dimana negara ini merupakan negara dengan perekonomian terkuat di dunia mengalahkan Amerika Serikat yang sedang mengalami krisis ekonomi dan negara-negara di Eropa. Di China terdapat sebuah kawasan ekonomi yang sekarang merupakan pusat perkenomian di Asia Timur disebut *Southern China Growth Triangle* (Hongkong, Taiwan, dan Provinsi China Selatan).

Di Indonesia, selama kurang lebih 15 tahun perkembangan KAPET ternyata dari 13 kawasan yang ditetapkan sebagai KAPET melalui Keputusan Presiden tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan. Dari 13 KAPET yang dikatakan berkembang hanya KAPET SASAMBA dan KAPET Manado-Bitung sedangkan yang lainnya nol besar alias tidak berkembang. Dalam perjalanannya juga KAPET seringkali tidak fokus dalam mengembangkan produk-produk unggulannya, yang terkadang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pengelolaan antara Badan Pengelola KAPET di daerah dengan Pemerintah Daerah.

Permasalahan-permasalahan utamanya adalah di sebagian kawasan-kawasan tersebut tidak menarik minat investor untuk berinvestasi, adapun masalah-masalah tersebut diantaranya meliputi (Susilowati, 2004):

- Faktor lokasi dan kondisi infrastruktur di sebagian kawasan tersebut kurang memadai sehingga menjadi penghambat dalam aliran investasi,
- Kurangnya peran kelembagaan baik itu pemerintah daerah maupun badan permodalan daerah setempat dalam hal proses perijinan maupun birokrasi yang menjadi lama dan rumit karena perbedaan peraturan,
- Kurang aktifnya Badan Pengelola KAPET di daerah dalam mempromosikan daerahnya.

Menurut Sekretariat Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET, masalah-masalah tersebut tidak menyurutkan daerah lain dalam mengajukan daerahnya menjadi KAPET (Heripoerwanto, 2004), usulan tersebut meliputi permintaan KAPET baru maupun perluasan KAPET dari Pemerintah Daerah setempat, yaitu:

- Permintaan KAPET baru (Kawasan Gopandang Gorontalo, Kawasan Goal Jailolo Maluku Utara),
- Permintaan KAPET Baru di provinsi yang sudah memiliki KAPET (Kawasan Nunukan-Tatapanbuma di Kalimantan Timur, Kawasan Selayar Sulawesi Selatan, Kawasan Timor Barat Nusa Tenggara Timur, Kawasan Sorong Papua),
- Permintaan perluasan wilayah KAPET yang sudah ada (Kapet Khatulistiwa, Batui, Bukari, Bima dan Mbay) serta,
- Relokasi wilayah KAPET (Kapet Sabang menjadi Bandar Aceh Darussalam).

Dalam RTRWN disebutkan bahwa Kabupaten Nunukan termasuk dalam Kawasan Andalan TATAPAN BUMA yang terdiri dari empat daerah otonom di Kalimantan Timur, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Empat kabupaten tersebut sekarang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara yang disahkan oleh DPR pada 25 oktober 2012 (UU No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara) dan merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan provinsi ini bertujuan untuk menghidupkan ekonomi warga perbatasan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia.

Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten paling utara Indonesia dengan luas 14.247,50 km² dan terbagi menjadi 15 kecamatan dan yang berbatasan dengan Malaysia ada 8 Kecamatan. Dilihat dari pertumbuhan ekonominya, Kabupaten Nunukan mendapat peringkat ke-2 dalam hal kontribusi PDRB di wilayah cakupan Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar (1,29%) sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi produk migas sekitar (6,79%) pada tahun 2012. Namun seperti kita ketahui hal tersebut tidak sebanding dengan keadaan sebenarnya yang ada di Nunukan, sebagai daerah perbatasan Negara banyak sekali masalah-masalah pembangunan, dari masalah sosial sampai masalah keamanan dan pertahanan pun menjadi satu disini seolah-olah menjadi wadah yang cocok untuk melihat segala permasalahan pembangunan di Indonesia.

Salah satu contoh adalah minimnya infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan yang rusak parah di trans Kaltim. Untuk menuju Kecamatan Krayan dari ibukota kabupaten di pulau Nunukan hanya bisa ditempuh melalui jalur udara sebagai alternatif pilihan transportasi warga di Nunukan sementara jalan daratnya masih tanah dan bahkan terputus. Terbatasnya fasilitas dan infrastruktur serta sarana dan prasarana di Kabupaten Nunukan inilah yang berdampak pada rendahnya tingkat aksesibilitas dan tingkat perekonomian warga.

Masalah kesenjangan ekonomi antara warga di Nunukan dengan warga Malaysia dimana hampir sebagian warga yang berada diperbatasan menggantungkan hidupnya di Malaysia. Dimulai dari mencari kebutuhan pokok sehari-hari sampai mencari pekerjaan pun disana lebih mudah dibandingkan dengan di Nunukan. Menurut data BPS Kabupaten Nunukan tahun 2012, jumlah pelintas batas Warga Negara Indonesia (WNI) menuju Malaysia pada tahun 2011 yaitu 203.115 orang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 152.996 orang.

Disamping masalah-masalah tersebut, terdapat banyak potensi SDA di Nunukan yang bisa dikembangkan diantaranya adalah sektor perkebunan dengan luas lahan sebesar 176.849 Ha dengan komoditas unggulan berupa; Kakao (coklat), kopi, kelapa sawit, sektor perikanan ikan laut dan ikan tambak. Ada juga wisata budaya dan wisata alam serta memiliki berbagai potensi di sektor agroindustri (industri hasil perkebunan dan kehutanan), perdagangan internasional, jasa pelabuhan, dan pariwisata. Semua potensi tersebut dapat menjadi andalan dalam mempercepat pengembangan di Kabupaten Nunukan.

Tujuan dari penetapan kawasan KAPET yaitu diarahkan untuk menciptakan pergerakan ekonomi suatu wilayah melalui potensi kawasan terhadap fungsi KAPET sebagai kawasan andalan. Dalam filosofi pengembangan KAPET yang mengkhususkan satu provinsi untuk satu kawasan pilihan menjadi modal untuk mengembangkan KAPET di daerah tertinggal seperti di Kabupaten Nunukan yang sekarang telah masuk kedalam provinsi baru Kalimantan Utara. Lokasi KAPET diusulkan oleh daerah yang dipilih dari kawasan andalan yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya wacana pengembangan KAPET oleh Pemkab Nunukan. Wacana pengembangan KAPET ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi pembangunan didaerah-daerah tertinggal khususnya daerah perbatasan seperti di Kabupaten Nunukan. Seperti dijelaskan sebelumnya, pemerintah Kabupaten Nunukan telah mengajukan usulan pembentukan KAPET baru di Nunukan tercatat mulai tahun 2004 berdasarkan data dari sekretariat Tim Teknis BP-KAPET.

Namun, responnya beragam terhadap permintaan tersebut mengingat banyak pertimbangan-pertimbangan untuk membentuk KAPET baru agar tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama di kawasan-kawasan KAPET yang telah ada sebelumnya seperti melakukan studi kelayakan, revitalisasi dan optimalisasi sistem KAPET, harus ada rekomendasi bupati/walikota, pemerintah daerah maupun gubernur lagipula saat itu Kabupaten Nunukan tidak termasuk dalam pembentukan KAPET dikarenakan untuk Provinsi Kalimantan Timur sendiri sudah terwakili oleh pengembangan KAPET SASAMBA (Samarinda, Sanga-Sanga, Samboja, Muara Jawa, Balikpapan).

Berdasarkan latar belakang seperti yang disebutkan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesiapan pengembangan KAPET di Kabupaten Nunukan. Dengan mempertimbangkan beberapa kriteria persyaratan terbentuknya KAPET yang telah direvitalisasi yaitu dukungan infrastruktur prioritas, pengembangan sektor unggulan selektif, daya saing investasi sektor yang semuanya didukung penuh oleh lembaga-lembaga yang terkoordinir dari pusat sampai ke daerah. Diharapkan dengan menjadi KAPET, setidaknya Kabupaten Nunukan bisa lebih mengejar ketertinggalannya melalui percepatan pembangunan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan seperti yang dijelaskan di latar belakang maka permasalahannya secara spesifik adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan KAPET di Kabupaten Nunukan belum dapat berjalan dikarenakan pada masih terdapat masalah-masalah dan kendala mendasar dalam berinvestasi seperti, faktor lokasi dan infrastruktur yang belum memadai, proses perijinan maupun birokrasi yang lama dan rumit, maupun kurang aktifnya BP-KAPET dalam mempromosikan daerahnya. Ada juga tumpang tindih kewenangan antara BP-KAPET pusat dengan pemerintah daerah setempat terkait masalah kebijakan dan perencanaan.
2. Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan negara mempunyai banyak permasalahan pembangunan meliputi minimnya infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan, kemudian ada masalah sosial yaitu masalah kesenjangan ekonomi antara warga di Nunukan dengan warga Malaysia dalam hal memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sampai mencari pekerjaan.
3. Pembentukan KAPET baru di Kabupaten Nunukan banyak pertimbangan-pertimbangan yang dimaksudkan agar tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama di kawasan KAPET yang sudah ada sebelumnya. Seperti pengembangan infrastruktur, sektor unggulan dan perlu melakukan studi kelayakan. Berdasar pada rekomendasi bupati/walikota, pemerintah daerah maupun gubernur sehingga tidak terbentur kewenangan dengan lembaga lain. Saat ini BP-KAPET sedang merevitalisasi dan mengoptimalisasi sistem KAPET melalui RTR KAPET.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan di atas, maka rumusan masalah sebagai landasan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Nunukan berdasarkan syarat terbentuknya KAPET?
2. Bagaimana kesiapan pengembangan KAPET di Kabupaten Nunukan ditinjau dari syarat terbentuknya KAPET?

1.4 Tujuan Studi

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi karakteristik wilayah Kabupaten Nunukan berdasarkan syarat terbentuknya KAPET sehingga dapat melihat apakah siap atau tidak dikembangkan menjadi KAPET.
2. Mengidentifikasi kesiapan pengembangan KAPET di Kabupaten Nunukan sehingga dapat mengusulkan rekomendasi pengembangan KAPET di Kabupaten Nunukan.

1.5 Manfaat Studi

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi peneliti
 - Dalam jangka pendek berguna sebagai dasar penyusunan skripsi agar dapat memperoleh data yang akurat dan terbaru.
 - Dalam jangka panjang hasil riset dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam usaha pemecahan masalah di wilayah-wilayah lain yang berbasis KAPET.
2. Manfaat bagi masyarakat
 - Untuk memberikan pandangan yang positif kepada masyarakat bahwa kawasan tertinggal bisa berkembang dan menghilangkan pandangan negatif masyarakat tentang kawasan perbatasan.
 - KAPET bisa menjadi salah satu alternatif model pembangunan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
3. Manfaat bagi Pemerintah Daerah
 - Memberi masukan kepada pemerintah kabupaten Nunukan untuk merealisasikan pembentukan KAPET di Kabupaten Nunukan khususnya.
 - Menjadi masukan dan bahan pertimbangan kepada Badan Pengembangan KAPET untuk pembentukkan KAPET baru yang sesuai dengan visi KAPET yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Manfaat bagi mahasiswa lainnya
 - Untuk membantu mahasiswa lainnya yang ingin membuat karya tulis tentang pengembangan KAPET.

1.6 Ruang Lingkup

1.6.1 Ruang Lingkup Materi

Pembatasan ruang lingkup materi yang akan dikaji dalam kesiapan pengembangan KAPET di Kabupaten Nunukan dalam penelitian ini secara umum didasarkan pada latar belakang penelitian; permasalahan yang terjadi; keterbatasan kemampuan peneliti; serta mengacu pada tinjauan kepustakaan, baik berupa teori-teori perwilayahan secara umum maupun berupa penelitian terdahulu. Adapun materi-materi yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi karakteristik ekonomi wilayah meliputi:
 - Jaringan Infrastruktur meliputi jaringan transportasi, telekomunikasi, energi listrik dan sumber daya air.
 - Karakteristik ekonomi masyarakat di Kabupaten Nunukan berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kegiatan perekonomian yang meliputi sektor, jenis dan jumlah komoditi.
2. Identifikasi karakteristik berdasarkan syarat terbentuknya KAPET (infrastruktur prioritas, sektor unggulan selektif, dan daya saing investasi sektor yang didukung kelembagaan yang terkoordinir) dan review studi lain terkait dengan pengembangan KAPET.
3. Evaluasi pengembangan KAPET di Nunukan apakah dinyatakan siap atau tidak, ditinjau dari beberapa faktor dan syarat terbentuknya KAPET.

1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah Studi

Ruang lingkup wilayah yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu Kabupaten Nunukan di provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan memiliki 15 Kecamatan dan yang berbatasan langsung dengan Malaysia ada 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Simanggaris, Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Utara, Tulin Onsoi dan Lumbis Ogong. Untuk batas wilayah administratif Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Negara Bagian Sabah, Malaysia
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi/Selat Makassar
- Sebelah Barat : Negara Bagian Sarawak, Malaysia
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, ruang lingkup wilayah studi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat studi, dan kerangka pemikiran, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memberikan penjelasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yaitu teori kewilayahan termasuk analisis-analisis yang digunakan dalam pembahasannya serta teori KAPET itu sendiri.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian yang dilakukan, tahapan-tahapan studi, diagram alir penelitian, penentuan variable penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis serta desain survey.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum wilayah studi, karakteristik, hasil evaluasi dan rekomendasi pengembangan KAPET di Kabupaten Nunukan guna menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian Kesiapan Pengembangan KAPET di Kabupaten Nunukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

1.8 Kerangka Pemikiran

